

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afiah, Ratna Nurul, 1985, *Praperadilan dan ruang lingkungannya*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- _____, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- _____, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta
- Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, dan Lamintang, Theo, 2010, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 2001, *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung.

Poernomo, Bambang, 1988, *Pola Dasar Teori Dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta,

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

_____ dan Mamudji, Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sofyan, Andi dan Asis, Abd, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenamedia, Jakarta.

Siahaan, Maruarar, 2011, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHP (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Karya Ilmiah & Internet

Arifanny Faizal, 2015, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 Terhadap Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Hukum Acara Pidana Terkait Asas Litis Finiri Oportet*. Skripsi, Program Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Eka Lestaria, 2014, *Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XXI/2013 Terhadap Pemenuhan Asas Kepastian Hukum dan Keadilan*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Eddy O.S. Hiarij, “Hal Ikhwal Praperadilan”, <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/08/14130431/Hal.Ikhwal.Praperadilan>, diakses 4 Oktober 2015.

Eddy O.S. Hiarij, “Menakar Bukti Minimum”, <http://nasional.kompas.com/read/2012/07/02/03041542/Menakar.Bukti.Minimum#>, diakses pada 3 November pukul 15.00.

Eddy O.S. Hiarij, “Menyandera Dengan Status Tersangka”, <http://nasional.kompas.com/read/2015/01/21/14130431/Menyandera.dengan.Stat.us.Tersangka>, diakses 3 Oktober 2015.

Reda Manthovani, “Praperadilan, Tinjauan Yuridis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/beranda/beritamedia/Praperadilan,TinjauanJuridisPascaPutusanMahkamahKonstitusi>, diakses pada 1 Oktober 2015 pukul 19.43.

D. Putusan :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XXI/2014.

| | | | |
|---|----------------------|--------------------|-------|
| Putusan 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. | Pengadilan Negeri | Jakarta Selatan | Nomor |
| Putusan 18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. | Pengadilan Negeri | Jakarta Selatan | Nomor |
| Putusan 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. | Pengadilan Negeri | Jakarta Selatan | Nomor |
| Putusan 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. | Pengadilan Negeri | Jakarta Selatan | Nomor |